

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI KOTA MAKASSAR

Disusun dan Diajukan oleh:

MUHAMMAD ZUL FADHIYATMA

A11115307



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Ekonomi

MUHAMMAD ZUL FADHIYATMA

A11115307



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ZUL FADHIYATMA

A11115307

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 12 Juli 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II


**Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si.,
CSF., CWM.**
NIP. 196904131994031003


**Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.,
CWM**
NIP.197709132002122002

Ketua Program Studi,


Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

ANALISA EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh:



MUHAMMAD ZUL FADHIYATMA

A11115307

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 12 Juli 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM	Ketua	
2. Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM	Sekretaris	2..... 
3. Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., M.Si., CWM	Anggota	3..... 
4. Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus, SE., M.Si	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CSF., CWM
NIP 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zul Fadhiyatma
NIM : A11115307
Program Studi : Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul ***Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Kota Makassar*** adalah karya saya sendiri dan tidak mmelanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya say aini terbukti bahwa Sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang llain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Juli 2022
yang menyatakan,



Muhammad Zul Fadhiyatma
A11115307

PRAKATA

Assalamualaykum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Azza WaJalla sebagai satu-satunya Tuhan Yang Esa, Yang pada diri-Nyalah sepatutnya seluruh makhluk tunduk dan patuh manjalan perintah-Nya. Dia Maha Membolak-balikkan hati, dan tempat dikembalikannya seluruh makhluk ciptaan-Nya. Salam dan Shalawat tak lupa pula kita haturkan kepada manusia terbaik di muka bumi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh dunia. Mengantarkan dan memimpin manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang dengan ilmu dan iman.

Skripsi ini yang berjudul “***Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Kota Makassar***” disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Jenjang S1 pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Tentu dengan seluruh keterbatasan dan kerendahan hati, kami menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari Kesempurnaan. Maka Kami mengharapkan adanya masukan dan kritik agar nantinya bisa dihasilkan sebuah karya tulis yang lebih baik. Penulisan karya tulis ini pun tidak terlepas dari dukungan banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Ares Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Dr. Sanusi Fattah S.E., M.Si., selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Dr. Nur Dwiana Sari Saudi SE., M.Si., selaku Sekretaris Departemen Departemen Ilmu Ekonomi, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, MA selaku Penasehat Akademik serta seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
4. Dr. Sanusi Fattah S.E., M.Si. dan Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si. selaku pembimbing 1 dan pembimbing 2 dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih atas kesediaan dan kesabarannya dalam meluangkan waktu dan memberikan arahan bantuan nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Dwiana Sari Saudi, S.E., M.Si., dan Dr. Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus SE., M.Si. selaku penguji yang memberikan motivasi dan untuk terus belajar dan dan berusaha untuk menjadi pribadi lebih baik.
6. Teman-teman Angkatan Ilmu Ekonomi "ANTARES" atas dukungan dan bantuan yang diberikan.

Semoga Allah Azza WaJalla memberikan balasan yang sebaik-baiknya dan melimpahkan ridho dan berkah-Nya atas seluruh amalan yang dilakukan serta menjadikan kita dimasukkan kedalam surga-Nya Amin ya Robbal Alamin.

Wassalamualaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 12 Juli 2022

Muhammad Zul Fadhiyatma

ABSTRAK
ANALISIS TINGKAT EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI KOTA MAKASSAR

Muhammad Zul Fadhiyatma
Sanusi Fattah
Retno Fitrianti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi Kota Makassar dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (djpk.kemenkeu.co.id) dengan metode pendekatan kuantitatif dengan menghitung tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi. Hasil yang didapatkan ialah efektifitas pajak daerah cukup baik sampai tahun 2019 meskipun dan turun pada tahun 2020 sedangkan efektifitas retribusi cenderung kurang baik. Sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota makassar sangat baik meskipun mengalami fluktuasi namun tingkat kontribusi retribusi Kota Makassar cenderung kurang baik.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas, Kontribusi

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of effectiveness and contribution of local taxes and Retribution in Makassar City using secondary data taken from the Directorate General of Fiscal Balance (djpk.kemenkeu.co.id) with a quantitative approach method by calculating the level of effectiveness and contributions of local taxes and retribution. The results obtained are that the effectiveness of local taxes is quite good until 2019 though and decreases in 2020 while the effectiveness of retribution tends to be less good. While the contribution level of local taxes to local revenue of Makassar City is very good, although it fluctuates, the level of contribution of retribution in Makassar City tends to be less good.

Keyword: Local Taxes, retribution, local revenue, effectivity, contribution

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	7
2.1.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8
2.1.3 Efektifitas dan Kontribusi	8
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Kerangka Pemikiran	14

2.4 Hipotesis Penelitian.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Rancangan Penelitian	16
3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	16
3.3 Populasi dan Sampel.....	16
3.4 Jenis dan Sumber Data	16
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.6 Metode Analisis.....	17
3.7 Definisi Operasional	17
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Deskripsi Data.....	18
4.2 Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar	18
4.3 Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	24
4.4 Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar	28
4.4.1 Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar	29
4.4.2 Efektifitas Penerimaan Retribusi Kota Makassar	29
4.5 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.....	29
4.5.1 Kontribusi Pajak Daerah Kota Makassar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	28
4.5.2 Kontribusi Retribusi Kota Makassar Terhadap Pendapatan Asli Daerah	28
4.6 Strategi Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah	28
BAB V PENUTUP.....	32
5.1 Kesimpulan	32

5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA.....	34
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2016-2020	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020.....	4
1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar 2016-2020.....	4
2.2 Penelitian Terdahulu	10
3.1 Pengukuran Nilai Efektifitas	17
3.2 Pengukuran Nilai Kontribusi.....	18
4.1 Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020.....	21
4.2 Rasio Efektifitas Retribusi Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020.....	23
4.3 Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020	25
4.4 Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Portal Data DJPK Kemenkeu..... 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di beberapa sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan pelayanan publik dapat menambah daya tarik terhadap investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut.

Kinerja Keuangan daerah sangat tergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat dan tingkat pertumbuhan ekonomi (potensi ekonomi) yang dapat diciptakan oleh daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal (Syamsudin, et,al, 2015).

Pembangunan ekonomi dilakukan dengan cara mengelola sumber daya yang ada dan membentuk kemitraan dengan masyarakat dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru yang nantinya mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut (Kuncoro, 2014). Pemberian otonomi kepada daerah disamping dalam rangka memperhatikan adanya keberagaman sosial dimasyarakat juga dimaksudkan untuk memberikan ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan

masyarakat dan pembangunan (Ristanti & Handoyo, 2017). Penyelenggara pembangunan daerah sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sumber daya alam dan ketersediaan dana (Nasution, 2019). Menurut Wijayanti (2017) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai eksistensi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yaitu daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan didalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam hal pembiayaan pembangunan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi kenyataannya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil sedangkan yang mendominasi masih sumbangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah daerah harus perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi perlu dilakukan upaya efektifitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (Puspitasari, 2014). Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bisa tahu kondisi keuangan setiap kabupaten atau kota oleh karena itu kinerja keuangan bisa ditingkatkan melalui peningkatan pelayanan di setiap kabupaten kota dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadahi agar pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dan pelayanan publik bisa maksimal. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber-

sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET PAD (Rp)	REALISASI PAD (Rp)
2016	1.305.180.000.000	971.860.000.000
2017	1.332.550.000.000	1.337.230.000.000
2018	1.483.710.000.000	1.185.450.000.000
2019	1.649.400.000.000	1.303,320,000,000
2020	1.749.400.000.000	1.078.330.000.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat realisasi pendapatan asli daerah kota makassar sangat fluktuatif mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2019 namun turun pada tahun 2018 dan 2020. Namun semuanya tidak dapat memenuhi target yang diharapkan.

Kota Makassar merupakan salah satu kota Provinsi Sulawesi Selatan juga diberi kewenangan mengelola sumber pendapatannya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan Kota Makassar maka diharapkan Kota Makassar mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Makassar. Sehingga nantinya mampu meningkatkan pajak daerah lalu memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar sendiri menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak sarang burung wallet. Perencanaan target pajak diperlukan sebagai tolak ukur yang diharapkan dapat

dicapai. Realisasi penerimaan pajak perlu dibandingkan dengan target pajak. Untuk itu perlu diketahui tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah. Dengan cara menghitung efektifitas dan kontribusi pemungutan pajak daerah dalam hal ini Kota Makassar dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET PAJAK DAERAH (Rp)	REALISASI PAJAK DAERAH (Rp)
2016	1.063.440.000.000	752.140.000.000
2017	1.063.440.000.000	938.800.000.000
2018	1.155.990.000.000	942,550.000.000
2019	1.315.000.000.000	1.067,320.000.000
2020	1.450,500.000.000	864.310.000.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id)

Dari tabel 1.2 dapat dilihat realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sampai tahun 2019 namun turun pada tahun 2020. Meski begitu capaian penerimaan pajak daerah tidak dapat memenuhi target pajak daerah Kota Makassar.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Makassar 2016-2020.

TAHUN	TARGET RETRIBUSI DAERAH (Rp)	REALISASI RETRIBUSI DAERAH (Rp)
2016	145.970.000.000	128.470.000.000
2017	94.680.000.000	72,790.000.000
2018	133.450.000.000	57.280.000.000

2019	133,220.000.000	68,100.000.000
2020	128,100.000.000	67,200.000.000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id)

Dari tabel 1.3 kita lihat Realisasi retribusi daerah Kota Makassar yang sempat turun di tahun 2017 dan 2018 lalu naik pada 2019 namun kemudian kembali sedikit mengalami penurunan pada 2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah makassar.
2. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan retribusi makassar.
3. Bagaimana tingkat kontribusi pajak daerah Kota makassar terhadap PAD Kota makassar.
4. Bagaimana tingkat kontribusi retribusi daerah Kota makassar terhadap PAD Kota makassar.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisa tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah dan retribusi makassar.
2. Menganalisa tingkat efektifitas masing-masing pemungutan pajak daerah dan retribusi makassar.
3. Menganalisa tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi makassar terhadap PAD Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: agar bisa dijadikan acuan dalam membuat kebijakan daerah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah, juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pentingnya efektifitas dalam

pungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu dapat memberikan informasi tentang berapa besar kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis: untuk menjadi salah satu bahan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Makassar serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih baik dimasa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah. (Halim., 2011:96)

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Hasil pajak daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang oleh pribadi ataupun badan kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat
- b. Hasil Retribusi daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberaian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah kepada kepentingan pribadi ataupun badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan hasil yang yang didapatkan daerah dari keuntungan perusahaan daerah dapat berupa dana pembangunan daerah yang merupakan bagian dari anggaran daeeerah yang disetor ke kas daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, berupa jasa giro, penjualan asset daerah, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing,

pendapatan bunga, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.1.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Resmi (2009:1), pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus*-nya digunakan *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Mardiasmo (2012:12) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang Simbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Afrizal (2009:47) Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.1.3 Efektifitas dan Kontribusi

Seseorang dikatakan efektif bila orang itu memberi dampak terhadap lingkungannya sesuai dengan kehendaknya sendiri, sama halnya dengan

dengan suatu organisasi efektifitas adalah ukuran kemampuan organisasi tersebut merealisasikan target yang diharapkan.

Mardiasmo (2012:134) Efektifitas adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas sebagai suatu kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. Ulum (2009) menjelaskan efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan.

Kontribusi adalah sumbangsi atau besaran faktor yang diberikan dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah. Maka dibandingkan antara Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, lalu Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dina Riftasari (2018)	Anallisa Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kontribusi Pajak Daerah, Kontribusi Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang rendah terhadap pendapatan asli daerah • Pajak Daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah
2.	Bob Mustafa, Abdul Halim (2008)	Pengukuran Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pendapatan Asli Daerah, Efektitas dan efisiensi kinerja, pelayanan public.	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah bertumbuh • Pajak daerah masih mendominasi pendapatan asli daerah • Kinerja Dinas Pendapatan Daerah memiliki struktur kerja yang baik.
3.	Andriani Padang (2021)	Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta	Efektifitas, efisiensi, kontribusi, strategi peningkatan penerimaan pajak terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pajak efektif mempengaruhi pendapatan asli daerah, • Penerimaan pajak terbukti efisien terhadap

		Strategi Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara	pendapatan asli daerah.	Pendapatan Asli Daerah, <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi penerimaan pajak terlaksana dengan baik
4.	Eko Aprianto (2017)	Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi Pajak Daerah, Efektifitas Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas Pajak Daerah mengalami penurunan • Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sangat baik • Penerimaan pajak daerah selalu mengalami peningkatan
5.	Hesti Pratiwi Muhaimin Wa Ode Rayyani	Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi, Kepatuhan wajib pajak, Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Wajib pajak Meningkat • Wajib pajak kurang memiliki kepatuhan membayar pajak • Peroleh pajak terhadap target penerimaan pajak mengalami ketidakstabilan
6.	Jeiny Ribka Pandelaki Daisy S.M. Engka Ita Pingkan Fasnier Rorong (2021)	Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif • Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat efisien

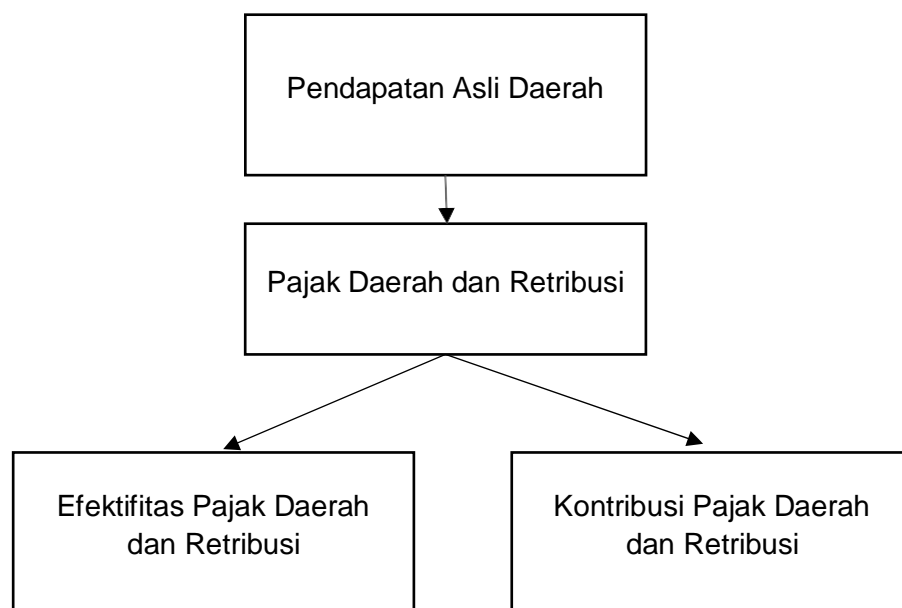
		Minahasa Tenggara		<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah cukup berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah
7.	Fika Utari (2018)	Analisa Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Medan	Meningkatkan pendapatan daerah, penerimaan pajak bumi dan bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak pernah mencapai target • Penerimaan pajak bumi dan bangunan berkontribusi sedang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
8.	Taufik Wibisono Yani Mulyani (2019) Sri	Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak bumi dan bangunan daerah efektif meningkatkan Pendapatan asli daerah • Pajak bumi dan bangunan cukup berkontribusi dalam pendapatan asli daerah
9.	Tri Iestari Putri Warganegara Revita Sari Iskandar A. A	Analisa Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Analisis SWOT	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja SDM pada pelayanan pajak sangat baik • Kelemahan dalam pemungutan pajak antar lain infrastruktur yang

		Daerah di Kota Bandar Lampung		kurang memadahi, kurangnya pemberlakuan sanksi pajak, dan kurangnya integrasi antar institusi.
10	Andy Kurniawan	Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus pada seluruh organisasi perangkat daerah Terkait Retribusi daerah tulungagung)	Retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah, Analisis pertumbuhan, Kontribusi, Analisis <i>overlay</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis mendalam mengenai perkembangan realisasi retribusi daerah dapat menggambarkan permasalahan yang terjadi
11	Irma Suryani	Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar Di Kabupaten Pekalongan	Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah, tax base, anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor internall dan faktor ekstenal dapat meningkatkan retribusi daerah. • Faktor-faktor strategis, pembenahan pengelolaan retribusi pasar, perluasan basis retribusi.
12	Parson Horota Ida Ayu Purba Riani Robert M Marbun	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi	Pendapatan Asli Daerah, Faktor Penghambat, Strategi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Jaya pura memiliki potensi yang besar dari segi penerimaan pajak dan retribusi, namun Penyelenggara n penerimaan pajak daerah dan

		Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura		retribusi daerah belum optimal.
--	--	---	--	------------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas tentang efektifitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Makassar. Setelah itu membahas efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi terhadap pendapatan asli daerah, penelitian ini juga menganalisa seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Makassar.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Diduga Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Efektif memenuhi target
Penerimaan Pajak Daerah
2. Diduga Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Efektif memenuhi Target
Penerimaan Retribus Daerah
3. Diduga Realisasi Penerimaan Pajak Daerah berkontribusi Baik Terhadap
Pendapatan Asli Daerah
4. Diduga Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Berkontribusi Baik
Terhadap Pendapatan Asli Daerah